

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan Pemerintah untuk mensejahterakan Pegawai memiliki peranan yang cukup berarti baik itu Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut yang harus diupayakan berkembangnya aktivitas masyarakat dalam dunia usaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Berhasil tidaknya suatu pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja atau yang biasanya disebut dengan Pegawai memiliki keberadaan yang sangat penting.

Berbicara mengenai tenaga kerja, maka kita dapat dari biaya gaji. Masalah gaji merupakan masalah yang sangat sensitif, karena hal ini dapat mempengaruhi sifat tingkah laku kerja dalam melaksanakan beban yang menjadi tanggung jawabnya. Bila pemerintah dipandang tidak cukup bijaksana dalam pelaksanaan gaji, maka bisa saja Pegawai melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah. Misalnya menuntut kenaikan gaji, mengurangi kegiatan kerjanya, melakukan usaha yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah, seperti melakukan manipulasi.

Mengingat masalah gaji merupakan masalah yang sensitif, maka untuk mengatasi masalah-masalah tersebut perlu mengembangkan suatu pengawasan intern gaji agar *system* penggajian tersebut masuk akal dan dapat dipertahankan. Dalam pengawasan intern gaji ini diupayakan terjadi hubungan antara pemerintah dengan tenaga kerja. Pemerintah berusaha merangsang motivasi kerja para Pegawai dengan melalui pemberian gaji, tunjangan-tunjangan, insentif, bonus, dan lain-lain sehingga dengan demikian diharapkan kerja para Pegawai semakin produktif. Dengan adanya sistem pengawasan intern yang tegas dan objektif akan mendorong para Pegawai untuk semakin produktif dan jujur.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin serta kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pemberian penghasilan Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih ditemukan beberapa masalah yang dapat dijelaskan dalam kasus ini antara lain seperti yang dijelaskan dibawah ini :

1. Apakah pengendalian proses penggajian yang ditetapkan telah berjalan dengan baik?
2. Bagaimanakah menindaklanjuti dari sistem penggajian yang manual ke sistem yang berbasis komputer dengan memanfaatkan teknologi?
3. Bagaimana membuat Sistem Informasi Penggajian Pegawai dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah perhitungan gaji Pegawai?.
4. Bagaimana sistem penggajian Pegawai dengan menggunakan model *waterfall*, berorientasi objek dan tools yang digunakan dalam UML ?.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut diatas serta dapat menyajikan informasi mengenai tentang proses penggajian terhadap Pegawai Honorer di Pemerintahan.

## 1.3 Ruang Lingkup / Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Input data Pegawai dan tahun anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Proses perhitungan penggajian Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari APBD.
3. Laporan data Pegawai dan penggajian Pegawai perbulan.
4. Penulis tidak membahas keamanan sistem dan level administrasi.

## **1.4 Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Model pengembangan perangkat lunak yaitu menggunakan model *Waterfall*.
2. Metode pengembangan perangkat lunak yaitu menggunakan metode Berorientasi Objek.
3. Untuk tools atau alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan penelitian**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Mempermudah dan mempercepat pengolahan data penggajian.
2. Mengurangi masalah *Human error* dalam perhitungan gaji sehingga meningkatkan akurasi data.
3. Mengefisiensi kinerja staf keuangan dan bendahara.
4. Memberikan kemudahan bagi Pegawai dalam melihat informasi penghasilannya.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya sistem ini maka rekapitulasi pendataan penggajian Pegawai Honorer dapat lebih baik dan terperinci.
2. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambah pengalaman tentang bagaimana merancang suatu sistem informasi Penggajian Pegawai Honorer.
3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian yang sama di masa yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap pelaksanaan yang disusun dalam beberapa bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang teori-teori yang mendukung judul, serta penjelasan tentang *tools/software* yang digunakan untuk pembuatan aplikasi sistem informasi.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan *tools* (alat bantu dalam analisis dan merancang sistem informasi).

### **BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN**

Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, analisis masalah sistem berjalan, analisa hasil solusi dan analisa kebutuhan sistem usulan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan yang berhubungan dengan penelitian.